

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAERAH VIA WEBSITE

Weni Saputri¹, Rohmad Yuliantoro²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Email : weni1500012035@webmail.uad.ac.id

ABSTRACT

Transparency is one aspect that must be present in order to realize good governance. Contains information clearly if such information is needed by the public and related parties. This study aims to find new evidence, the factors that influence regional financial transparency via the website relating to the disclosure and accessibility of local financial information by using six factors that are suspected to affect transparency, namely, PAD, regional government size, government complexity, regional spending, debt financing ratio and the quality of financial statements.

This study examines the transparency of regional financial information on the website for a sample of 125 local governments in Sumatra based on disclosure and accessibility to information, and runs a multiple linear regression test model.

Research model I found that the complexity of the government, regional spending and the quality of financial statements affect the disclosure of regional financial information via the website while the other three variables have no effect. Then, model II research found that only PAD, size of regional government and regional expenditure affect the accessibility of regional financial information via the website, while other factors have no effect.

Keywords : *Transparency, financial information transparency, local government, website.*

PENDAHULUAN

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi merupakan salah satu aspek terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: kesediaan dan aksesibilitas dokumen; kejelasan dan kelengkapan informasi; keterbukaan proses; dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi (Kristianten, 2006:73)

Terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki keterbukaan informasi mengenai badan publik kepada masyarakat luas. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.

Adapun transparansi keuangan dan kinerja dapat dilakukan melalui *website*. Puspita dan Martani (2012) menyebutkan alasan pentingnya transparansi keuangan dan kinerja melalui *website* karena biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi serta kemudahan tingkat aktivitas entitas ekonomi dibanding ketika dilakukan dengan manual dan konvensional (Bonson dan Escobar, 2005). Pengungkapan informasi keuangan melalui *website* dinilai efisien dan efektif dalam meningkatkan derajat transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi asimetri informasi antar pejabat publik dengan masyarakat (*World Bank*, 2003 dalam Mya dan Komarrudin, 2014).

Pengungkapan informasi keuangan melalui *website* dinilai efisien dan efektif dalam meningkatkan derajat transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi asimetri informasi antar pejabat publik dengan masyarakat (*World Bank*, 2003 dalam Mya dan Komarrudin, 2014). Penelitian ini memberikan gambaran kepada pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya

masyarakat, sehingga dapat menialai tansparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu peneliti juga ingin melihat sejauh mana pemerintah daerah bersikap transparan atas informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan yang di publikasikan pada situs resmi pemerintah daerah seperti informasi tentang pendapatan asli daerah, ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang dan kualitas laporan keuangan.

Peneliti mengambil objek penelitian di Sumatera karena adanya peningkatan jumlah *website* yang dimiliki oleh pemerintah daerah di pulau Sumatera. Sumatera merupakan salah satu pulau yang mendominasi kasus korupsi, terpidana korupsi baik politisi, pejabat negara, maupun swasta sepanjang tahun (Tribun Kaltim, 18-11-2018). pada penelitian ini yang dilakukan adalah menguji bagaimana pengaruh Pendapatan Asli daerah, Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemerintahan, Belanja Daerah, Rasio Pembiayaan Utang, dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mangangkat topik penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2017)”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan dan Penerapannya pada Pemerintahan

Teori keagenan adalah teori yang membahas mengenai hubungan kontraktual antara *principal* dan agen. *Principal* dan agen masing-masing memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungannya dan tidak ada alasan untuk mempercayai agen akan selalu bertindak sesuai keinginan *principal*. Oleh karena itu, akan timbul biaya agen dalam rangka memberikan keyakinan pada *principal* (Godfrey, 2009).

Teori Signalling dan Penerapannya di Pemerintahan.

Teori *signalling* pada pemerintahan dapat dianalogikan dengan pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah adalah pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola kekayaan masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab pula memberikan informasi atau sinyal pada masyarakat untuk memberikan keyakinan yang memadai pada masyarakat.

Good public governance dan e-government.

Pemerintah dapat menggunakan beberapa media sebagai sarana pemerintah dalam memberikan informasi keuangan maupun kinerjanya pada masyarakat secara transparan. Salah satu media yang dapat digunakan adalah internet. Hasil riset menunjukkan bahwa salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah publikasi laporan keuangan di internet (Laswad et al, 2005).

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prasyarat akuntabilitas administratif kepada publik. Transparansi juga merupakan salah satu elemen kunci didalam *good governance* berupa penjaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan publik.

Pengembangan Hipotesis

Pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan efektifitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah untuk dijadikan sebagai pendapatan secara otonomi yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemda yang memiliki PAD tinggi akan menunjukkan kepada para *stakeholdersnya* bahwa pemda telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi merupakan sinyal dari manajemen publik yang baik (Christiaensens, 1999). Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1a : Rasio PAD berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H1b : Rasio PAD berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

Ukuran pemda adalah besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah. Pemerintahan daerah yang berukuran besar umumnya memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar. Ukuran pemda pada penelitian ini diproksikan dengan total aset. Semakin besar jumlah aset maka akan semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2a : Ukuran Pemda berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H2b : Ukuran Pemda berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

Kompleksitas pemerintahan diproksikan dengan jumlah penduduk suatu daerah. Banyaknya jumlah penduduk merupakan gambaran dari besarnya penyediaan layanan publik yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin besar tuntutan pengungkapan informasi keuangan daerah selaku pengelola keuangan daerah. karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3a : Kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H3b : Kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja, seharusnya pemerintah daerah

memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4a : Belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H4b : Belanja daerah berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

Menurut Styles & Tennyson (2007) melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah akan berdampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan program-program terpadu bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Namun utang tidak boleh lebih besar dari jumlah modal yang dimiliki. Semakin tinggi rasio pembiayaan utang maka seharusnya semakin baik pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5a : Rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H5b : Rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

Salah satu indikator kualitas laporan keuangan adalah opini audit yang dilihat dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini audit dikelompokkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW). Pemerintah daerah yang mendapat opini WTP merupakan pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan yang baik dan akan cenderung melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet untuk menunjukkan sinyal kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6a : Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H6b : Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

METODE PENELITIAN

Populasi Data dalam penelitian ini berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2017 yang telah di audit BPK, populasi pada penelitian ini sebanyak 164 pemerintah daerah di Sumatera yang terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peneliti mengambil sampel dari kriteria-kriteria berikut ini :

Tabel 3.1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Seluruh Pemda di Sumatera yang telah diaudit oleh BPK TA 2017	164
2.	Tidak tersedianya data berupa Neraca dan LRA pada Laporan Keuangan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan	(0)
3.	<i>Website</i> Pemda tidak tersedia dan tidak dapat diakses	(39)
	Jumlah Sampel	125

Sumber: Diolah dari data penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling*. Populasi pemda yang diaudit oleh BPK RI di Sumatera pada TA 2017 yaitu 164 pemda dapat diwakili oleh jumlah sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 125 Pemda. Jenis data yang digunakan untuk mengukur variabel dependen dan variabel independen pada penelitian ini adalah data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,42147372
	Absolute	,119
Most Extreme Differences	Positive	,116
	Negative	-,119
Kolmogorov-Smirnov Z		1,331
Asymp. Sig. (2-tailed)		,058

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk variabel pengungkapan sebesar 1,331 dengan signifikan 0,058 dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta		Toleranc e	VIF
(Constant)	-9,216	2,565		,000		
1 x1	-,545	,548	-,115	,322	,477	2,098
x2	-,471	,317	-,298	,141	,158	6,345

x3	-7,223E-008	,000	-,268	,036	,400	2,499
x4	1,330	,397	,707	,001	,143	7,007
x5	3,159	1,879	,147	,095	,838	1,193
x6	-,367	,101	-,294	,000	,968	1,033

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,447	,969		2,526	,491
x1	,133	,207	,073	,643	,521
x2	,086	,120	,140	,714	,477
1 x3	6,429E-009	,000	,062	,500	,618
x4	-,276	,150	-,380	-1,844	,119
x5	-,652	,709	-,078	-,918	,360
x6	,236	,038	,487	6,161	,355

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019

Tingkat signifikansi $> \alpha$ 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji F-Test (Uji Signifikansi Serentak)

Hasil F-Test (Uji Signifikan Serentak)

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,301	6	1,217	6,518	,000 ^b
	Residual	22,027	118	,187		
	Total	29,328	124			

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai F sebesar 6,518 dengan nilai sig sebesar 0,000. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai sig lebih kecil dari nilai alpha ($0,000 < 0,05$), hal ini berarti model di terima.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Hasil Uji R² (Koefisien Determinasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,499 ^a	,249	,211	,43206

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,249 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen adalah sebesar 24,9%, sedangkan sisanya 75,1% dijelaskan oleh variabilitas variabel-variabel lain diluar model penelitian ini. Atau secara keseluruhan variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang dan kualitas laporan keuangan dapat menjelaskan prediksi pengungkapan informasi keuangan daerah sebesar 24,9%.

Uji T (Parsial)

Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-9,216	2,565		-3,593	,000
PAD	-,545	,548	-,115	-,995	,322
UP	-,471	,317	-,298	-1,482	,141
1 KP	-7,223E-008	,000	-,268	-2,121	,036
BD	1,330	,397	,707	3,350	,001
RPU	3,159	1,879	,147	1,682	,095
KLK	-,367	,101	-,294	-3,621	,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,322 > 0,05$ maka H1a ditolak yaitu Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah.

2) Ukuran Pemda (UP)

Berdasarkan hasil output SPSS pada diatas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,141 > 0,05$ maka H2a ditolak yaitu Ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah.

3) Kompleksitas Pemerintahan (KP)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel atas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,036 < 0,05$ maka H3a diterima yaitu Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah.

4) Belanja Daerah (BD)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel atas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$ maka H4a diterima yaitu Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah.

5) Rasio Pembiayaan Utang (RPU)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel atas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,095 > 0,05$ maka H5a ditolak yaitu Rasio Pembiayaan Utang tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah.

6) Kualitas Laporan Keuangan (KLK)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel atas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ maka H6a diterima yaitu Kualitas Laporan Keuanagn berpengaruh terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah.

II Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,25845936
	Absolute	,120
Most Extreme Differences	Positive	,120
	Negative	-,093
Kolmogorov-Smirnov Z		1,342
Asymp. Sig. (2-tailed)		,055

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan niali *Kolmogorov-Smirnov* untuk variable aksesibilitas sebesar 1,342 dengan signifikan 0,055 dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
(Constant)	3,902	13,744		,777		
x1	10,122	2,937	,421	,001	,477	2,098
x2	-6,755	1,701	-,843	,000	,158	6,345
1 x3	-2,879E-007	,000	-,210	,117	,400	2,499
x4	6,786	2,127	,711	,002	,143	7,007
x5	-,729	10,066	-,007	,942	,838	1,193
x6	,471	,543	,074	,387	,968	1,033

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Dari tabel diatas diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *torelance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2,578	6,994		-,369	,713
1 x1	4,665	1,495	,359	3,121	,353
x2	-5,304	,866	-1,225	-6,127	,143
x3	-1,933E-007	,000	-,261	-2,082	,228

x4	5,775	1,083	1,121	5,335	,389
x5	-4,247	5,123	-,072	-,829	,409
x6	,109	,276	,032	,394	,694

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Tingkat signifikansi $> \alpha$ 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji F-Test (Uji Signifikansi Serentak)

Hasil F-Test (Uji Signifikan Serentak)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	122,769	6	20,461	3,817	,002 ^b
Residual	632,479	118	5,360		
Total	755,248	124			

Sumber : Dari data sekunder yang diolah, 2019

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai F sebesar 3,817 dengan nilai sig sebesar 0,002. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai sig lebih kecil dari nilai alpha ($0,002 < 0,05$), hal ini berarti model di terima.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Hasil Uji R² (Koefisien Determinasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,403 ^a	,163	,120	2,31517

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,120 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen

adalah sebesar 12,0%, sedangkan sisanya 88,0% dijelaskan oleh variabilitas variabel-variabel lain diluar model penelitian ini. Atau secara keseluruhan variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang dan kualitas laporan keuangan dapat menjelaskan prediksi pengungkapan informasi keuangan daerah sebesar 12,0%.

Uji T (Parsial)

Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,902	13,744		,284	,777
PAD	10,122	2,937	,421	3,446	,001
UP	-6,755	1,701	-,843	-3,971	,000
1 KP	-2,879E-007	,000	-,210	-1,578	,117
BD	6,786	2,127	,711	3,190	,002
RPU	-,729	10,066	-,007	-,072	,942
KLK	,471	,543	,074	,868	,387

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$ maka H1b diterima yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah.

2) Ukuran Pemda (UP)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ maka H2b diterima yaitu Ukuran Pemda berpengaruh terhadap Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah.

3) Kompleksitas Pemerintahan (KP)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,117 > 0,05$ maka H3b ditolak yaitu Kompleksitas Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah.

4) Belanja Daerah (BD)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,002 < 0,05$ maka H4b diterima yaitu Belanja Daerah berpengaruh terhadap Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah.

5) Rasio Pembiayaan Utang (RPU)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,942 > 0,05$ maka H5b ditolak yaitu Rasio Pembiayaan Utang tidak berpengaruh terhadap Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah.

6) Kualitas Laporan Keuangan (KLK)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,387 > 0,05$ maka H6b ditolak yaitu Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah.

Hasil dan pembahasan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil olahan statistik model 1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih besar dibandingkan level of significant yaitu sebesar $0,322 > 0,05$, artinya PAD tidak berpengaruh terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan daerah via *website*, maka H1a ditolak. Semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporannya. Website dapat dipandang sebagai salah satu media berbasis teknologi dan informasi yang andal dalam penyampaian informasi keuangan daerah. Adapun PAD merupakan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Tubels & Dyah Purwanti (2016). Hasil penelitiannya yaitu rasio PAD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Selanjutnya merujuk pada hasil olahan statistik untuk model 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu sebesar $0,001 < 0,05$, artinya PAD berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*, maka H1b diterima.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Agus Tubels (2016) yang menunjukkan bahwa rasio PAD tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*. Dapat diduga bahwa perbedaan hasil tersebut karena adanya perbedaan subjek penelitian ini dengan subjek penelitian Agus Tubels (2016). Adapun Agus Tubels (2016) menggunakan subjek seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia.

Ukuran Pemda (UP)

Berdasarkan hasil olahan statistik model 1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih besar dibandingkan level of significant yaitu sebesar $0,141 > 0,05$, artinya UP tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah via *website*, maka H2a ditolak. Semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuangannya. Adapun ukuran pemda diukur dengan menggunakan total aset pemda. Aset merupakan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu Neraca. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran pemda maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah. Namun hasil pengujian secara statistik gagal membuktikan hipotesis tersebut.

Hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Tubels & Dyah Purwanti (2016) yang menyimpulkan bahwa

ukuran pemda tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah via *website*.

Berdasarkan hasil olahan statistik untuk model 2 tabel 4.16 dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu sebesar $0,000 < 0,05$, artinya UP berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*, maka H2b diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Styles & Tennyson (2007). Mereka menyimpulkan bahwa UP berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah.

Kompleksitas Pemerintahan (KP)

Berdasarkan hasil olahan statistik model 1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu sebesar $0,036 < 0,05$, artinya KP berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah via *website*, maka H3a di terima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kadek (2015) yang menyimpulkan bahwa kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah via *website*.

Selanjutnya merujuk pada hasil olahan statistik model 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih besar dibandingkan level of significant yaitu sebesar $0,117 > 0,05$, artinya KP tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*, maka H3b ditolak. Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintahan daerah. Besarnya jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik disetiap daerah. Dimana tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan pengetahuan masyarakat mengenai internet lebih canggih maka lebih banyak informasi keuangan daerah yang dapat diakses pada situs resminya. Namun pada tipe pemerintahan yang berbentuk desa yang penduduknya lebih sedikit dan kurangnya pengetahuan penduduk mengenai

internet akan menghambat diperolehnya informasi keuangan daerah pada situsnya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad *et al* (2005) yang menyimpulkan bahwa kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*.

Belanja Daerah (BD)

Berdasarkan hasil olahan statistik model 1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan level of significant yaitu sebesar $0,001 < 0,05$, artinya Belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah via *website*, maka H4a diterima.

Hasil Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Tubels (2016) yang menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil olahan statistik model 2 pada tabel 4.16 dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu $0,002 < 0,05$, artinya Belanja daerah berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*, maka H4b diterima.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Agus Tubels (2016) yang menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah.

Rasio Pembiayaan Utang (RPU)

Berdasarkan hasil olahan statistik model 1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih besar dibandingkan level of significant yaitu sebesar $0,095 > 0,05$, artinya rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah via *webiste*, maka H5a ditolak. Pelaporan informasi keuangan di internet merupakan sara yang potensial

untuk memfasilitasi pemantauan oleh kreditur. Maka pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih tinggi akan memberikan pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Styles & Tennyson (2007) dan Agus Tubels & Dyah Purwanti (2016) yang menyimpulkan bahwa rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Selanjutnya merujuk pada hasil olahan statistik untuk model 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih besar dibandingkan level of significant yaitu sebesar $0,942 > 0,05$, artinya rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*, maka H_5b ditolak. Pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih tinggi cenderung akan membatasi akses pengguna ke informasi keuangan pada situs resminya. Pembatasan akses akan memberikan dampak bahwa pemerintah daerah kurang transparan atas informasi-informasi yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan penggunaan utang yang lebih tinggi sebagai sumber pembiayaannya akan memberikan sinyal kinerja pemerintah daerah yang rendah. Namun hasil pengujian secara statistik gagal membuktikan hipotesis tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Styles & Tennyson (2007) dan Agus Tubels & Dyah Purwanti (2016) yang menyatakan bahwa rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah.

Kualitas Laporan Keuangan (KLK)

Berdasarkan hasil olahan statistik model 1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan level of significant yaitu sebesar $0,000 < 0,05$, artinya KLK berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah via *website*, maka H_6a diterima.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Tubels (2016) yang menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan olahan statistik model 2 pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari level of significant yaitu sebesar $0,387 > 0,05$, artinya KLIK tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*, maka H_{6b} ditolak.

Adapun kualitas laporan keuangan merupakan cerminan kesesuaian laporan keuangan Pemda dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Opini terbaik yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik Opini Laporan Keuangan maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah. Namun hasil pengujian secara statistik gagal membuktikan hipotesis tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Agus Tubels & Dyah Purwanti (2016) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah.

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang sejauh mana faktor-faktor seperti PAD, ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi transparansi pemerintah daerah yang dilihat berdasarkan pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah pada situs resminya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil pengujian model satu menunjukkan bahwa PAD, ukuran pemda dan rasio pembiayaan utang tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Sedangkan kompleksitas pemerintahan,

belanja daerah dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

2. Hasil pengujian model dua menunjukkan bahwa PAD, ukuran pemda dan belanja daerah memiliki pengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah. Sedangkan kompleksitas pemerintahan, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah.

Keterbatasan

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan penelitian ini, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini belum menghasilkan kesimpulan yang sempurna sehingga masih ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya membuktikan bahwa dari enam variabel hanya tiga variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah yaitu kompleksitas pemerintah, belanja daerah dan kualitas laporan keuangan sedangkan variabel PAD, ukuran pemda dan rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.
2. Penelitian ini hanya membuktikan dari enam variabel hanya tiga variabel yang berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah yaitu PAD, ukuran pemda dan belanja daerah sedangkan variabel kompleksitas pemerintah, rasio pembiayaan utang dan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah.
3. Penelitian ini hanya meneliti 125 pemda yang dapat diakses dari 164 pemda yang ada di pulau sumatera.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas maka saran yang diajukan untuk peneliti selanjutnya adalah:

- 1) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau mengganti variabel lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan via *website*.
- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menguji variabel lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan struktur pemerintahan.
- 3) Penelitian selanjutnya agar menambahkan sampel penelitian dan subjek penelitian di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta. BPK RI.
- Hilmi, Amiruddin Z dan Dwi Martani. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012.
- Indrianto, N., & Supomo, B. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM
- Jensen, M., & Meckling W. 1976. *Theory of the fir: managerial behavior, agency costs, and ownership structure*. Journal of Financial Economics.
- Laswad, F., Fisher, R., Oyerele, P. 2005. *Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities*. ELSEVIER
- Mustofa, Anies Iqbal. *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang Siantar*. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 1 no. 1.(2012). h. 1-6
- Nainggolan, Agus Tubels dan Dyah Purwanti. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via website*. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung, 2016.
- Pratama, Kadek Aris Dwi., Desak Nyoman Sri Werastuti, & Edy Sujana. 2015. *Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3, No.1 Tahun 2015.
- Puspita, Rora., & Dwi Martani. 2012. *Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda*. Universitas Indonesia
- Rohman, Abdul. *Aksesibilitas, Penyajian dan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi pada Kota dan Kabupaten Tegal)*.

Jurnal Akuntansi. Tahun XIII. No.03, September 2009. Hal 252-264

Style, A. K., & Tennyson, M. 2007. *The accessibility of financial reporting of u.s municipalities on the internet*. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Serrano, Carlos. Mar. Rueda. Pilar, Portillo. 2008. *Factors influencing e-disclosure in local public administrations*. Dteconz, Vol. 3. 2008, Zaragoza, Spanyol.

Setyaningrum, Dyah & Febriyani Syafitri. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 9, No.2 Tahun 2012.

Sinaga, Yurisca Febriyanty. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan laporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah*. Skripsi. FEB UNDIP. Semarang.

Trisnawati, Mya Dewi & Komarudin, Achmad. 2014. *Determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet*. Jurnal Brawijaya.

Undang-undang Republik Indonesia 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Pajak Keterbukaan Informasi Publik.

Waliiyani, Ghaniyyu Mintotik & Amir Mahmud. 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal, Volume 4, No.2 Tahun 2015.